BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H. M. Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 23 September 2020

Nomor : 0100/K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Perihal : Surat Penyampaian

KepadaYth.

1. **Tim Kampanye Pasangan Calon Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska. M**
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum**
3. **Tim Kampanye Pasangan Calon Muddasir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksa Kasim, SH.,MH**

Di –

B a r r u

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

II. Berdasarkan dasar surat tersebut, menjelang pelaksanan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 pada tanggal 26 September 2020 maka Bawaslu Kabupaten Barru menyampaikan dan mengingatkan pasangan calon dan tim kampanye untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   A. Ketentuan larangan dan sanksi dalam Undang-Undang Pilkada berbunyi :
      1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa **dalam Kampanye dilarang :**
         a. **mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
         b. **menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota,dan/atau Partai Politik;**
         c. **melakukan Kampanye berupa menghasut,memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;**
         d. **menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;**
         e. **mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;**
         f. **mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;**
         g. **merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;**

h. **menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;**
i. **menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
j. **melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya;dan/atau**
k. **melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.**

2. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
   1) **Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:**
      a. **pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;**
      b. **aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan**
      c. **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.**
   2) **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
   3) **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:**
      a. **menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan**
      b. **dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.**
   4) **Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.**
   5) **Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.**

3. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
   1. **Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
   2. **Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:**
      a. **peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau**
      b. **penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.**
   3. **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.**

4. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
   1) **Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.**
   2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
   3) **Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

4) **Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:**
   a. **mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hakpilih;**
   b. **menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; danc.mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.**

5) Pasal 187 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:
   2) **Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).**
   3) **Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulanatau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**

6) Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).**

7) Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa **Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

B. Ketentuan larangan dalam masa Kampanye dalam Peraturan KPU :
   1. Pasal 26 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud padaayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uangnilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima riburupiah);
   2. Pasal 30 Ayat 9 Peraturan KPU Nomor 4 Tahunn 2017 menyebutkan bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimanadimaksud pada ayat (7), dilarang berada di: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; dan d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
   3. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa :
      1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran danjumlah yang telah ditentukan

2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota
3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau WakilBupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calondilarang memasang Alat PeragaKampanye yang menggunakan program pemerintahdaerahselama masa cuti kampanye.
5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yangmenjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

4. Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :
   1) **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,PasanganCalon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.**
   2) **Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabunganPartai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.**
   3) **Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.**
   4) **Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar biaya daerah.**
   5) **Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapatmemberikan hadiah, dengan ketentuan:**
      a. **dalam bentuk barang; dan**
      b. **nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**
5. Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :
   1) **Pelanggaran atas larangan ketentuanpemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; atau b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalamwaktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.**
   2) **Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.**
6. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

C. Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang marak terhadap pengumpulan/kerumunan jumlah orang dalam skala besar, maka secara keseluruhan tahapan Pilkada serentak 2020 untuk dapat menjadi perhatian yaitu :

a. Sebagaimana pasal 11 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa

1. **Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, PenghubungPasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.**
2. **Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease2019 (COVID-19).**
3. **Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

III. Demikian surat penyampaian ini sebagai bentuk pencegahan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Barru di Barru;
3. Pimpinan Partai Pengusung di Barru;
4. Pertinggal.